



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta Kode Pos 10640 Tlp.(021)29079176 ext.1521 Fax.(021)29079201
www.badilum.mahkamahagung.go.id, Mail <http://eptsps.badilum.mahkamahagung.go.id>

SURAT TUGAS
Nomor 46/DJU/ST.HM3.1.2/II/2026

- Menimbang
- a

bahwa berkaitan dengan surat Ketua Umum Pengurus Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia Nomor 05/BPHPI-IKAHI/II/2026 tanggal 05 Februari 2026 hal Diskusi FCFCOA - BPHPI, sehubungan dengan kehadiran Perwakilan *Federal Circuit and Family Court of Australia* (FCFCOA) dalam acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2026, maka Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia bekerja sama dengan *Australia Indonesia Partnership for Justice 3* (AIPJ3) akan menyelenggarakan diskusi dengan tema *Judicial Wellbeing and Safe Workplaces*, yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2026 secara daring dan luring (*hybrid*) di Ruang Rapat Lt. 12 Gedung Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta 10110, maka perlu menunjuk nama – nama yang telah ditetapkan untuk menjadi peserta dalam acara tersebut;

b

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu segera menerbitkan Surat Tugas kepada yang bersangkutan;
- Dasar
- 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5

Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

MENUGASKAN

Kepada :

I. PESERTA OFFLINE
Peradilan Umum

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja
1.	Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi	Pengadilan Tinggi Riau
2.	Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Tinggi	Pengadilan Tinggi Jambi
3.	Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Tinggi	Pengadilan Tinggi Makassar
4.	Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
5.	Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.	Hakim	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



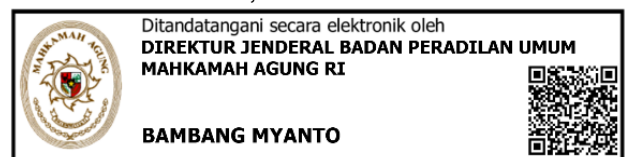
II. PESERTA ONLINE

1. Seluruh Pengurus BPHPI selain yang hadir Offline.
2. Seluruh Anggota Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia – IKAHI (Seluruh Hakim Perempuan Indonesia).
3. Seluruh Hakim Indonesia pada Peradilan Umum.

- Untuk : 1. Menghadiri dan berpartisipasi diskusi dengan agenda :
1. Diskusi tentang *Judicial Wellbeing* (Kesejahteraan Yudisial)
 2. Diskusi tentang *Safe Workplaces* (Keamanan Dan Kenyamanan di Tempat Kerja).
- yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2026 secara daring melalui Zoom Meeting : Meeting ID: 952 4198 8105 Passcode : 497133 dan luring di Conference Centre Lt. 12 Gedung Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta 10110.
2. Para peserta hadir sesuai penugasan sebagai berikut :
 - a. Pengurus BPHPI pada daftar nama terlampir untuk hadir secara langsung (*offline*);
 - b. Seluruh Hakim Indonesia, Pengurus dan anggota BPHPI lainnya untuk hadir secara virtual (*online*);
 3. Menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut.
 4. Koordinasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dapat menghubungi Pengurus Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI).

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Februari 2026



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Ketua Umum Pengurus Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia di Jakarta.
4. Sekretaris Umum Pengurus Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia di Jakarta.
5. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
6. Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
7. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

